



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



DISUSUN OLEH :

**KANTOR KECAMATAN PONTANG
KABUPATEN SERANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Khadirat Ilahi Robbi, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan LAKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026.

Secara yuridis formal Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP), dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

Pontang, Januari 2025

KAMAT PONTANG

SAMSURI, S.E
NIP. 19680101 198703 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Susunan Organisasi	2
C. Bidang Tugas Pokok Dan Kedudukan	3
D. Aspek Strategis	8
1. Kekuatan (<i>Strengths</i>)	9
2. Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	9
3. Peluang (<i>Opportunities</i>)	9
4. Tantangan (<i>Threats</i>)	10
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA	
A. Rencana Strategis	13
B. Tujuan dan Sasaran	14
C. Kebijakan dan Program	14
1. Kebijakan	14
2. Program	15
D. Rencana Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Gambaran Umum	17
B. Pengukuran Kinerja	17
1. Indikator Kinerja	19
2. Indikator Kinerja Sasaran/Pengukuran Pencapaian Sasaran	19
3. Indikator Kinerja Kegiatan/Pengukuran Kinerja Kegiatan	19
C. Evaluasi Kinerja	19
D. Aspek Keuangan	25
E. Analisis Efisiensi dan efektivitas Kinerja	25
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	26
B. Saran	26
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TABEL PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) TAHUN 2024	
2. TABEL REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada Tahun 2024, secara umum Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang berhasil melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang diembannya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

Hasil evaluasi dan analisis terhadap 6 (enam) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimana rata-rata pencapaian targetnya 79,24%, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pencapaian target 78,55%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan target 60,35%, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pencapaian targetnya sebesar 23,66%, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum pencapaian targetnya sebesar 79,71%, dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa pencapaian target sebesar 31,77%.

Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) dengan segenap bantuan dari seluruh pihak yang terkait demi pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sebagian urusan pemerintahan di kecamatan dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Setiap instansi pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan negara, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, wajib memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Oleh sebab itu maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi. Adapun informasi yang diharapkan dari laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

B. Susunan Organisasi

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kesempatan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat.

Atas dasar hal tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Serang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang.

Kedudukan Kantor Kecamatan Pontang adalah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah di wilayah kecamatan, dipimpin oleh seorang camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di kecamatan, dan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di kecamatan;
2. Pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di kecamatan;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di kecamatan;
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di kecamatan; dan Pelaksanaan tugas tambahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 100 Tahun 2016 tersebut, susunan organisasi Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretaris camat ;
 - a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Kasubbag Keuangan, Program dan Evaluasi
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Kesejahteraan Sosial (Kesos);
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang);
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantib).

C. Bidang Tugas Pokok Dan Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan uraian tugas sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi :

- Perencanaan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di kecamatan;
 - Pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di kecamatan;
 - Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di kecamatan;
 - Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di kecamatan;
- dan

Camat membawahi Sekretaris Camat yang membantu dan mengurus kesekretariatan kecamatan, dan membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi. Camat juga membawahi para Kepala Seksi terdiri dari Seksi Pemerintahan, Kasi

Kesejahteraan Sosial (Kesos), Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), dan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantib).

2. Sekretaris;

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan serta melaporkan penyelenggaraan urusan kesekretariatan camat.

Dalam pelaksanaan tugas sekretaris mempunyai fungsi :

- Perencanaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan camat;
- Pengaturan penyelenggaraan urusan kesekretariatan camat;
- Pelaksanaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan camat;
- Pengawasan penyelenggaraan kesekretariatan camat; dan
- Pelaksanaan tugas tambahan.

a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian.

Fungsi :

- Perencanaan penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- Pengaturan penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- Pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- Pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian; dan
- Pelaksanaan tugas tambahan.

b.Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi

Tugas Pokok :

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan urusan administrasi keuangan, program dan evaluasi.

Fungsi :

- Perencanaan penyelenggaraan urusan administrasi keuangan, program dan evaluasi;
- Pengaturan penyelenggaraan urusan administrasi keuangan, program dan evaluasi;
- Pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi keuangan, program dan evaluasi;
- Pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi keuangan, program dan evaluasi; dan
- Pelaksanaan tugas tambahan.

3. Seksi Pemerintahan

Tugas Pokok

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan urusan tata pemerintahan.

Fungsi :

- Perencanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan urusan tata pemerintahan
- Pengaturan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan urusan tata pemerintahan;
- Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan urusan tata pemerintahan;
- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan urusan tata pemerintahan; dan
- Pelaksanaan tugas tambahan

4. Seksi Kesejahteraan Sosial (Kesos)

Tugas Pokok :

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan urusan kesejahteraan sosial

Fungsi :

- Perencanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan urusan kesejahteraan sosial;
- Pengaturan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan urusan kesejahteraan sosial;
- Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan urusan kesejahteraan sosial;
- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan urusan kesejahteraan sosial; dan
- Pelaksanaan tugas tambahan

5. Kasi Ekonomi Pembangunan (Ekbang)

Tugas Pokok :

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan urusan ekonomi pembangunan

Fungsi :

- Perencanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan urusan ekonomi pembangunan;
- Pengaturan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan urusan ekonomi pembangunan;
- Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan urusan ekonomi pembangunan;
- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan urusan ekonomi pembangunan; dan
- Pelaksanaan tugas tambahan

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Fungsi :

- Perencanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pengaturan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- Pelaksanaan tugas tambahan

7. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantib)

Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Fungsi :

- Perencanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pengaturan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan urusan ketentraman dan ketertiban umum; dan Pelaksanaan tugas tambahan.

Selanjutnya sebagai gambaran mengenai keberadaan sumber daya aparatur pada Kantor Kecamatan Puloampel sebagian besar berpendidikan sarjana. Hal ini merupakan salah satu pendorong dan motivasi untuk menciptakan budaya kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan per Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang
Menurut Tingkat Pendidikan*

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	2 Orang
2.	Sarjana (S1)	10 Orang
3.	Diploma III/SARMUD	-
4.	D II	-
5.	D I	-
6.	SMA/SMK/Sederajat	11 Orang
7.	SLTP	1 Orang
8.	SD	1 Orang
	TOTAL	25 orang

Keterangan : * Data bulan Desember 2024

D. Aspek Strategis

Untuk lebih memfokuskan strategis Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Serang secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung di luar kendali. Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut, Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang menggunakan metode atau teknik analisis *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)* atau analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

1. Kekuatan (*Strengths*)

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kinerja Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Serang, adalah :

- a. Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan;
- b. Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi untuk bekerja normative dan taat aturan;
- c. Adanya komitmen kerja yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan tupoksi;
- d. Dukungan prangkat organisasi yang solid;
- e. Memiliki pola kerja yang baku.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas organisasi Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang dalam pencapaian tujuannya, berdasarkan hasil analisis adalah :

- a. Sumber daya manusia yang mendukung kinerja masih sangat minim;
- b. Kapasitas sumber daya manusia yang ada belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
- c. Alokasi dana oprasional serta sarana dan prasarana yang mendukung kinerja belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal;
- d. Koordinasi dengan instansi lain belum berjalan secara optimal;
- e. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

3. Peluang (*Opportunities*)

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Serang antara lain :

- a. Adanya Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kewenangan yang diberikan kepada camat, sehingga Kantor Kecamatan Pontang memiliki kewenangan yang lebih luas untuk dapat memberikan pendekatan pelayanan

dan menjalankan roda pemerintahan di kecamatan;

- b. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja guna mewujudkan Kantor Kecamatan Pontang yang professional dan handal;
- c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat di dalam mendapatkan pelayanan, merupakan fakat yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja Kantor Kecamatan Pontang.

4. Tantangan (*Threats*)

Tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, terutama datangnya dari luar sistem organisasi/eksternal yang sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan yang tidak berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 3 Tahun 2012 akan mengakibatkan menurunnya kinerja aparat;
- b. Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Kantor Kecamatan Pontang.

Dari hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal dan eksternal, maka dilakukan analisis dan pembobotan untuk masing-masing unsur guna menentukan strategi yang diperlukan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Serang yang telah ditetapkan.

Strategi yang akan ditempuh merupakan paduan antara faktor kekuatan yang dimiliki dengan mereduksi faktor kelemahan yang ada dan menghindari segala ancaman yang dihadapi oleh organisasi, strategis tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2.
Analisis Penetapan Strategi Organisasi
Matrik SWOT

	Kekuatan (S) 1. Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. 2. Komitmen dan konsistensi pimpinan organisasi; 3. Aparat yang komitmen; 4. perangkat organisasi yang solid; 5. Pola kerja yang baku.	Kelemahan (W) 1. Jumlah dan kapasitas SDM; 2. Alokasi dana operasional serta sarana dan prasarana; 3. Koordinasi dengan instansi lain; 4. Pola pembinaan aparat, dan pengendalian intern.
Peluang (O) 1. Peraturan Bupati Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kewenangan yang diberikan kepada camat; 2. Tuntutan akuntabilitas; 3. Perkembangan IPTEK dan peran serta masyarakat.	Strategi S-O 1. Membangun sistem pelayanan prima; 2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.	Strategi W-O 1. Membangun mekanisme prosedur dan pola kerja yang efektif serta efisien untuk mewujudkan pelayanan prima; 2. Menambah jumlah SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi; 3. Membangun profesionalisme aparatur, dan melaksanakan pengendalianintern untuk mendorong peningkatan kinerja.
Tantangan (T)	Strategi S-T 1. Koordinasi dengan SKPD Teknis dalam	Strategi W-T 1. Menerapkan pola kerja dan pola pembinaan

1. Pelaksanaan kewenangan yang tidak berjalan;	melaksanakan sebagian kewenangan serta tetap melaksanakan	aparatus yang serasi dengan potensi yang ada.
2. Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional.	kewenangan yang diberikan; 2. Meningkatkan komitmen dan kinerja aparatur.	

Berdasarkan hasil analisis *SWOT* sebagaimana tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi, di antaranya :

1. Rumusan Permasalahan Strategis Yang Dihadapi Masa Kini.

Pelaksanaan sebagian kewenangan yang masih belum berjalan dan sesuai dapat mengakibatkan terhambatnya pelayanan terhadap masyarakat dalam menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

2. Rumusan Perubahan, Kecendrungan Masa Depan Yang Berpengaruh pada Tupoksi.

Adanya peraturan baru akan berpengaruh pada pelaksanaan Tupoksi dari masing-masing unsur SKPD.

3. Rumusan Perubahan Internal Yang Perlu Dilakukan.

- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam menunjang tupoksi bagi jabatan struktural, untuk menghasilkan aparatur yang berkualitas dan berkompeten;
- b. Penyusunan rencana pembagian tugas staf;
- c. Pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin berkembang;
- d. Evaluasi dan peningkatan mutu penyelenggaraan pakta integritas di lingkungan Kantor Kecamatan Pontang;
- e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
- f. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat masyarakat;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

A. Rencana Strategis

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah mulai dari eselon III Mandiri, dan eselon II ke atas wajib menetapkan/merumuskan rencana strategis.

Rencana strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, saran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, yang dipimpin oleh seorang camat dengan eselon III/d, telah mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang yang disusun berdasarkan pertimbangan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap kebijakan Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

Rencana Strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini, Kantor Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang telah menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman dan respon dari organisasi perangkat daerah lainnya dan *Stakeholder*.

Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang sebagai unsur staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, agar berdaya guna dan berhasil guna, efisien dan efektif mempunyai Visi yang mengacu kepada Visi Kabupaten Serang yang menjadi acuan pencapaian kegiatan yang tertuang dalam perancangan Renstra secara menyeluruh. Renstra meliputi pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi kinerja yang terintegrasikan secara sinergis dalam melaksanakan amanat institusional.

B. Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan arah dan tujuan Pembangunan di Bidang Pemerintahan Umum, Kecamatan Pontang Kabupaten Serang berupaya dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima serta Peningkatan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Disamping untuk membangun aparatur Negara yang professional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis.

C. Kebijakan dan Program

1. Kebijakan

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Serang yang ingin dicapai, Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang menggunakan kebijakan dan program. Kebijakan ditetapkan sebagai arah untuk memenuhi tugas pokok dan kewajiban, dengan mengacu pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya kebijakan yang ditetapkan, yaitu menjalankan sebagian kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi :

1. Perencanaan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di kecamatan;
2. Pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di kecamatan;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di kecamatan;
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di kecamatan dan Pelaksanaan tugas tambahan.

2. Program

Untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana tersebut di atas, telah disusun program, yaitu sebagai berikut :

- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**, dengan kegiatan terdiri atas :
 - 1) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- b. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, dengan kegiatan terdiri atas :
- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
- c. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**, dengan kegiatan terdiri atas :
- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
 - 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.
- d. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**, dengan kegiatan terdiri atas :
- 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**, dengan kegiatan terdiri atas :
- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- f. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah**, dengan kegiatan terdiri atas :
- 1) Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

D. Rencana Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 disajikan tersendiri dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari LAKIP tahun 2024 ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Gambaran Umum

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang selaku penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan di kecamatan. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian Kinerja, Sasaran, Program dan kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

B. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Kantor Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari **Input**, **Output**, dan **Outcome**. Sedangkan pencapaian Indikator Makro dilakukan dengan membandingkan Target dan Realisasi Indikator Makro. Adapun media pengukuran kinerja terdiri atas :

1. Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) yang memberikan informasi tentang tingkat pencapaian target dari kegiatan yang ditentukan di Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. (data sebagaimana terlampir)
2. Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) yang memberikan informasi tentang tingkat pencapaian target dari sasaran yang ditentukan.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

1. > 100 = Amat Baik
2. $80 - 100$ = Baik
3. $50 - 79$ = Cukup
4. < 50 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target kinerja yang diharapkan, berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditentukan sebelumnya, yang terdiri dari :

1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator Masukan (*input*), Keluaran (*output*), Hasil (*outcome*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

2. Indikator kinerja Sasaran/Pengukuran Pencapaian Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3. Indikator Kinerja Kegiatan/Pengukuran Kinerja Kegiatan

Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam :

- a. Masukan (*input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.
- b. Keluaran (*output*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keseluruhan kegiatan pada jangka waktu menengah, *outcome* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

C. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dilakukan dengan mengevaluasi hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Untuk lebih jelasnya hasil evaluasi dari kedua pengukuran tersebut sebagai berikut :

1. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pada Tahun Anggaran 2024, Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang sebagai penyelenggara pemerintahan umum di kecamatan, sehingga sasaran belum dapat ditentukan pada Format Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

2. Evaluasi Kinerja Kegiatan

Kegiatan merupakan tindakan kongkrit yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan mengacu kepada kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Jumlah seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang pada Tahun 2024 sebanyak 19 (sembilan belas) kegiatan. Dari 6 (enam) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, pada tahun 2024 secara keseluruhan telah dilakukan evaluasi. Analisis diarahkan terhadap Capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang menghasilkan nilai dengan katagori < 50 berkatagori kurang, 50 – 79 berkatagori cukup, dan capaian kinerja yang bernilai 80 sampai dengan 100 berkatagori baik, serta capaian di atas nilai 100 yang ekstrim berkatagori amat baik.

Evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan diarahkan terhadap indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari : Input, Output dan Outcome. Hasil evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja antara 80% sampai dengan 100% yang mempunyai makna baik.

Hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang pada tabel Capaian Kinerja Program dan kegiatan yang dianalisis yaitu sebagai berikut :

a. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Kegiatan : 6 (enam) kegiatan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Input	3.077.643.367,-	2.519.888.470,-	79,24
		Output	Terselenggaranya Administrasi keuangan perangkat daerah		
		Outcome	100%		

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Input	18.000.000,-	0,-	0,00
		Output	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		
		Outcome	0%		
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Input	149.004.564,-	76.165.000,-	51,12
		Output	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		Outcome	100%		
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Input	43.816.000,-	42.456.000,-	96,90
		Output	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
		Outcome	100%		
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Input	228.194.546,-	169.081.266,-	74,10
		Output	Terselenggaranya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah		
		Outcome	100%		
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Input	145.042.100,-	94.112.000,-	64,89
		Output	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		Outcome	100%		

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan, pencapaian berkategori 79,24% yang bermakna Cukup.

b. Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Jumlah Kegiatan : 2 (dua) kegiatan

Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Input	23.212.500,-	0,-	0,00
		Output	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		Outcome	0%		
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Input	1.005.878.373,-	808.380.268,-	80,37
		Output	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
		Outcome	100%		

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik hanya dapat dilaksanakan sebesar 78,55% berkategori cukup.

c. Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Jumlah Kegiatan : 1 (Satu) kegiatan

Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Input	133.315.000,-	80.450.000,-	60,35
		Output	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa		
		Outcome	100 %		

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dapat dilaksanakan dengan pencapaian berkategori 60,35 % yang bermakna cukup.

d. Program : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah Kegiatan : 1 (satu) kegiatan

Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Input	37.200.000,-	8.800.000,-	23,66
		Output	Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
		Outcome	100%		

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat dilaksanakan dengan pencapaian/serapan anggaran 23,66 % bermakna kurang.

e. Program : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Jumlah Kegiatan : 1 (satu) kegiatan

Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Input	177.909.000,-	141.810.000,-	79,71
		Output	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
		Outcome	100%		

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dapat dilaksanakan satu kegiatan dengan pencapaian berkategori 79,71% yang bermakna cukup.

f. Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah Kegiatan : 1 (satu) kegiatan

Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Input	151.775.000,-	48.220.000,-	31,77
		Output	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
		Outcome	100%		

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dapat dilaksanakan satu kegiatan dengan pencapaian berkategori 31,77% yang bermakna kurang.

D. Aspek Keuangan

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, khusus Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai. Oleh karena itu, pada Tahun 2024 Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang mengelola anggaran belanja sebesar Rp. 5.190.990.450,- dengan rincian :

- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 3.077.643.367,-
- b. Belanja Modal sejumlah Rp. 53.257.000,-
- c. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 2.060.090.083,-

Sebagai salah satu informasi, bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran pembiayaan untuk kegiatan guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, belum adanya standar yang baku sehingga penghematan anggaran tidak dapat terlaksana dikarenakan anggaran tersebut sudah mengacu kepada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang sudah disesuaikan dengan Standar Anggaran Biaya (SAB) yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Serang. Ada beberapa kegiatan yang tidak terserap sehingga anggaran tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan *time schedule* dan mata anggaran yang direncanakan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

E. Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Kinerja

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara *Input* dan *Output* baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu. Efisiensi umumnya ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana pada *input* dalam menghasilkan *output*. Nilai efisiensi terhadap penggunaan dana anggaran tersebut, sebesar Rp. 869.985.552,00 (17,89 %). Dengan demikian efisiensi terhadap anggaran belanja Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang sebesar : $\text{Rp. } 4.860.420.695,00, - \text{Rp. } 3.990.435,143.00 = \text{Rp. } 869.985.552,00$

Selain analisis efisiensi, juga dilakukan analisis efektifitas dengan cara membandingkan antara hasil (*Outcome*) dengan keluaran (*Output*), yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil (*Outcome*). Berdasarkan perhitungan analisis efektifitas kinerja kegiatan, kinerja Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang dalam melaksanakan 19 (sembilanbelas) kegiatan mempunyai nilai tingkat efektifitas 88,01%.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hal tersebut terlihat dari prosentase tingkat pencapaian target indikator kegiatan yang pada dasarnya dengan penilaian berkategori baik untuk seluruh kegiatan, yaitu 11 (sebelas) kegiatan rata2 berkategori baik dan sangat baik, Dan tidak ada kegiatan yang penilaian *output* dengan katagori di bawah 0-50 (< 50 = Kurang), hal ini menunjukkan bahwa serapan anggaran kegiatan cukup baik walaupun tidak maksimal pada Program kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :

- a. Senantiasa meningkatkan koordinasi dengan OPD dan pihak-pihak terkait, guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
- b. Perlu adanya peningkatan etos kerja dan penempatan kerja pelaksana yang diperbantukan pada masing-masing desa pada kantor kecamatan untuk mendukung dalam proses peningkatan kualitas pelayanan dan administrasi;

- c. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia di bidang pelaksanaan berdasarkan tupoksi;
- d. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;

Meningkatkan pengendalian intern, pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.

Pontang, Januari 2024



NIP. 19680101 198703 1 005

TABEL PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN PONTANG KABUPATEN SERANG

NO	SASARAN					PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN	KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai	Bulan	14	14	100	
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Jasa Keamanan	Orang/bln	1	0	0	
3	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan bahan dan pembersih kantor	Tahun	1	1	100	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	Tahun	1	1	100	
5	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	Tahun	1	1	100	
6	Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Tahun	1	1	100	
7	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat-rapat dan koordinasi dalam/luar daerah	Tahun	1	1	100	
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin	Tahun	1	1	100	
9	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Tahun	1	1	100	
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Tersedianya ATK, Benda Pos - Tersedianya jasa pramubakti	kegiatan	2	2	100	
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya belanja listrik dan Internet	Tahun	1	1	100	
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Orang/bln	7	7	100	

NO	SASARAN					PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN	KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas dan terbayarnya pajak kendaraan	Tahun	1	1	100	
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor	Tahun	1	1	100	
15	Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung dan bangunan kantor	Tahun	1	1	100	
16	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya kegiatan musrenbang kecamatan	Kegiatan	1	1	100	
17	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Kewenangan lain yang Deilimpahkan	Terselenggaranya dukungan : - HUT Kabupaten - AKCF - BBGRM - Pemeliharaan Fasos Fasum - Porkab - Isbat Nikah	Kegiatan	6	3	50	
18	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan: - P2TP2A - Serang Sehat - PKK	Kegiatan	3	1	33	
19	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pembinaan UMKM	kegiatan	1	0	0	
20	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum	kegiatan	1	0	0	

NO	SASARAN					PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN	KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya peringatan HUT RI	kegiatan	1	1	100	
22	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Terlaksananya kegiatan/dukungan: Kegiatan Keagamaan MTQ	kegiatan	1	1	100	
23	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan desa	Tahun	1	1	100	
24	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya pemilihan kepala desa	desa	0	0	0	
25	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PBB	kegiatan	1	0	0	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KANTOR KECAMATAN PONTANG KABUPATEN SERANG
TAHUN 2024**

NO	SASARAN			TARGET KINERJA SASARAN TAHUNAN			PELAKSANA
	PROGRAM	KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Rp	OUTPUT	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota		Cakupan Penyelenggaraan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kota		3.661.700.577,-		
		Administrasi Keuangan Perangkat daerah			3.077.643.367,-		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai	100	3.077.643.367,-	19 Pegawai	Bagian Keuangan Program dan Evaluasi
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			18.000.000,-		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Jasa Keamanan	100	18.000.000,-	1 Orang	Bagian Trantibum
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			149.004.564,-		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor	100	14.066.500,-	Alat dan Bahan Pembersih Kantor	Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	100	35.469.900,-	Penyediaan makan dan minum	Bagian Umum dan Kepegawaian

Penyediaan Bahan Cetak dan Pengandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	100	1.740.164,-	Bahan Cetak dan Penggandaan	Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan, publikasi dan promosi serta peraturan perundang-undangan	100	7.200.000,-	Koran/majalah dan Publikasi	Bagian Umum dan Kepegawaian
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	100	8.428.000,-	Makanan dan Minuman Tamu	Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	82.100.000,-	Komponen instalasi listrik	Bagian Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			43.816.000,-		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin	100	43.816.000,-	Peralatan dan mesin kantor	Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			228.194.546,-		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Tersedianya ATK, Benda Pos Tersedianya jasa Pramubakti	100	2.580.000,-	ATK dan Pramubakti 4 orang	Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya belanja listrik dan internet	100	31.766.955,-	Rekening /Token Listrik dan internet	Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100	193.847.591,-	1 orang	Bagian Umum dan Kepegawaian

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			145.042.100,-		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas dan terbayarnya pajak kendaraan	100	42.363.200,-	Kendaraan dinas	Bagian Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan/peralatan Kantor	100	12.000.000,-	Perlengkapan/peralatan kantor	Bagian Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung dan bangunan kantor	100	90.678.900,-	gedung dan bangunan	Bagian Umum dan Kepegawaian
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan		1.029.090.873,-		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	23.212.500,-		
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya kegiatan musrenbang kecamatan	100	23.212.500,-	1 kegiatan	Bagian Ekonomi dan Pembangunan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	1.005.878.373,-		

		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Kewenangan lain yang Deilimpahkan	Terselenggaranya dukungan : - HUT Kabupaten - AKCF - BBGRM - Pemeliharaan Fasos Fasum - Porkab - Isbat Nikah	100	1.005.878.373,-	4 kegiatan	Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
C	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Cakupan Koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan		133.315.000,-		
		Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	133.315.000,-		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terselenggaranya Musrenbang Desa	100	51.915.000,-		Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan : - P2TP2A - Serang Sehat - PKK	100	81.400.000,-	3 kegiatan	Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
D	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Cakupan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan		37.200.000,-		

		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	37.200.000,-		Bagian Ketentraman dan Ketertiban
		Sinergitas dengan kepolisian negara republic Indonesia ,TNI dan instansi vertical di wilayah kecamatan	Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum	100	27.300.000,-	1 kegiatan	Kec. Pontang
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terciptanya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100	9.900.000,-		
E	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		177.909.000,-		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	177.909.000,-		
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Naional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya peringatan HUT RI	100	81.230.000,-	HUT RI	Bagian Kesejahteraan Sosial

		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan/dukungan: - Kegiatan Keagamaan - MTQ	100	96.679.000,-	2 kegiatan	Bagian Kesejahteraan Sosial
F	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase pemerintahan desa yang dibina		151.775.000,-		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordnasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	151.775.000,-		
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan desa	100	151.775.000,-	3 Kegiatan	Bagian Pemerintahan
PAGU INDIKATIF					5.190.990.450,-		

Pontang, Januari 2025



SAMSURI, S.E

NIP. 196801011987031005